

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1) Kajian tentang Politik Identitas

a) Pengertian politik identitas

Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok, ras, etnis, suku, negara, budaya, agama, atau yang lain untuk mencapai tujuan politik tertentu. Politik identitas dalam praktiknya sangat bisa terlihat karena didasarkan pada kesamaan identitas suatu kelompok ditengah masyarakat yang plural. Praktik politik identitas juga tak jarang menjadi sumber konflik ditengah masyarakat, dimana masyarakat yang merasa kelompoknya superior melawan kelompok inferior ataupun kelompok mayoritas melawan kelompok minoritas. Penjabaran dari identitas politik menjadi politik identitas sendiri adalah identitas politik yang dianut oleh warga negara yang berkaitan dengan arah politiknya. Politik identitas sendiri lahir dari sebuah kelompok sosial yang seakan merasa diintimidasi dan didiskriminasi oleh dominasi negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Hal ini yang menjadi dasar mengapa politik identitas lahir.¹

Kajian politik dalam membedakan politik identitas (*political of identity*) dan identitas politik (*political identity*) sudah sangat jelas diterangkan dan kandungan keduanya sangat berbeda. Politik identitas diartikan sebagai mekanisme politik pengorganisasian identitas sebagai sumber dan sarana politik. Sedangkan identitas politik adalah konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik.²

Identitas keagamaan, kelas, ras, etnis, gender, dan seksualitas disebut dengan identitas sosial. Identitas sosial ikut menentukan posisi individu dalam relasi atau interaksi dalam bidang sosialnya. Berbeda dengan identitas sosial identitas politik meliputi nasionalitas dan kewarganegaraan, dimana identitas politik ikut mempengaruhi keputusan untuk menentukan posisi individu tersebut dalam sebuah komunitas

¹ Indah Sari, 'Politik Identitas Komunitas Bali Di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin', 1.1 (2020), 38–48.

² Kristianus, 'Politik Dan Strategi Budaya Etnik Dalam Pilkada Serentak Di Kalimantan Barat', *Indonesian Political Science Review*, volume 1.1 (2016), 87–101.

melalui rasa kepemilikan (*sense of belonging*) dan menandai posisi subjek yang lain dalam suatu perbedaan yang disadari (*sense of otherness*).³

Kemala Chandakirana mengungkapkan bahwa politik identitas sebagai alat politik yang digunakan oleh para elit politik dan penguasa maupun pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan kami bagi “orang asli” yang menghendaki kekuasaan dan mereka bagi “orang pendatang” yang harus melepaskan kekuasaan. Penarikan kesimpulan dalam dua pernyataan tersebut dapat dengan mudah diperoleh karena sangat jelas perbedaannya dimana politik identitas hanya alat yang digunakan oleh penguasa untuk memperoleh kepentingan kekuasaan, kepentingan ekonomi serta menjadi alat penghalang dan memanipulasi fakta. Karakteristik politik identitas yang disebutkan oleh Klaus Von Beyme dibagi menjadi 3 yaitu :

- 1) Membangun kembali narasi besar yang prinsipnya ditolak dan membangun suatu teori yang mengendalikan faktor-faktor biologis sebagai penyusun perbedaan mendasar sebagai realitas kehidupan menjadi gerakan politik identitas.
- 2) Tendensi untuk membangun sistem apartheid terbaik menjadi gerakan politik identitas. Kekuasaan ketika tidak dapat dilakukan dan pembagian kekuasaan tidak mencapai tujuan gerakan, pemisahan dan pengecualian diri diambil sebagai jalan keluar.
- 3) Kelemahan dari gerakan politik identitas adalah upaya untuk menciptakan kelompok teori spesifik dari ilmu.

Politik identitas di Indonesia pada dasarnya sudah mempunyai konstruksi yang kuat dari zaman penjajahan hingga zaman kemerdekaan. Persamaan identitas sebagai warga negara yang baru merdeka melahirkan rasa dan sikap nasionalisme yang tinggi dari masyarakat untuk menunjukkan politik identitas mereka dalam menyelenggarakan ketatanegaraan.⁴

Politik identitas di Indonesia pada masa itu bukan saja nasionalisme saja yang menjadi tolak ukur utama. Perjuangan masyarakat Indonesia yang di dominasi oleh umat yang memeluk agama Islam juga turut memberikan kontribusi besar

³ Muhamad Ridwan and Iqbal Syafrudin, ‘Pertalian Agama Pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017’, volume 19.2 (2020).

⁴ Muhammad Sirajudin Fikri and Nico Oktario Adytyas, ‘Politik Identitas Dan Dan Penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong Kito Dalam Demokrasi Lokal)’, *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, Vol. XVIII No. 2, 2018, XVIII.2 (2018).

bagi sejarah perjuangan masyarakat Indonesia sampai saat ini. Tidak hanya sekedar teatrikal saja bahwa umat muslim ingin menjadikan identitas keagamaan yang diyakininya sebagai superior dalam tatanan kenegaraan, tetapi sejarah panjang telah membuktikan bahwa nasionalisme dan Islam di Indonesia telah sejak lama berdampingan dan menciptakan hubungan yang harmonis.

Munculnya politik identitas dalam dinamika politik di Indonesia yang mempunyai situasi politik yang sangat beragam tidak terlepas dari rasa ketidakadilan dan persamaan hak yang dianggap dimiliki suatu kelompok atau golongan sosial tertentu. Perbedaan di tengah masyarakat juga menjadi salah satu tolak ukur utama dari keberagaman yang ada di Indonesia menjadikan politik identitas yang ada di Indonesia semakin memperjelas perbedaan tersebut.

Pemberian ketidak tercapaiannya keseimbangan dan kekondusifan situasi di tengah demokratisasi suatu negara adalah ruang yang diberikan oleh politik identitas. Seperti halnya di Indonesia khususnya Jakarta, politik identitas yang secara pelan tetapi pasti menjelma sebagai dua kekuatan besar dalam perpolitikan yang didominasi oleh kaum nasionalis dan kaum Muslim, apabila dalam pengelolaan dua potensi besar tidak dengan kebijaksanaan akan menyebabkan kehancuran kestabilan negara.

Menciptakan pertentangan antara kedua identitas tersebut dapat mengancam dan menghancurkan kestabilan negara apabila negara tidak memiliki *political will* dalam menangani sekaligus menjadi pihak tengah dalam menyikapi persoalan ini. Kepentingan masyarakat juga menjadi korban, sebab politik identitas sebagai politik perbedaan merupakan tantangan tersendiri bagi tercapainya sistem demokratisasi yang mapan dalam sebuah negara.⁵

Pertentangan antara identitas nasionalisme dan identitas agama saat ini semakin memanas hingga kestabilan nasional menjadi terganggu. Perbedaan pandangan politik di antara keduanya menjadikan kelompok identitas ini melahirkan berbagai isu-isu yang menjadi kegaduhan masyarakat luas yang

⁵ Endang Sari, 'Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta', *Kritis, Jurnal Ilmusosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, vol2.2 (2016), 145–56.

disebabkan oleh propaganda dan klaim kelompok terhadap kebenaran identitas yang mereka yakini.

Proses pembentukan identitas dapat terbentuk dengan baik secara parsial maupun secara interaksial. Pembentukan identitas ini akan menyebabkan perubahan sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya. Identitas etnis dan agama sendiri, adalah dua hal yang menjadi elemen dasar yang sangat mempengaruhi perubahan sosial. Proses terjadinya politik identitas keagamaan sendiri akan berdampak langsung pada perubahan sosial begitupun sebaliknya.⁶

Politik identitas etnisitas secara langsung dan tidak langsung nyata atau samar, berdampak pula pada perubahan sosial. tidak terkecuali pembentukan, penamaan, dan penggunaan identitas yang pula melahirkan dan berdampak pada perubahan sosial tersebut. Perubahan sosial tersebut akan mempengaruhi kecenderungan masyarakat dalam menjalankan perannya dalam lingkup demokrasi.

Keterkaitan atau interrelasi antara perubahan sosial dan identitas adalah sebagai sesuatu yang saling bertentangan, baik secara samar atau terang-terangan diantara masyarakat. Pengaktualisasikan penerapan identitas pada seseorang dapat saja mencerminkan atau mewakili dirinya sendiri maupun kelompok dalam kontek etnitas dapat terbentuk suatu identitas seperti Jawa, Tionghoa, Madura, Bali, dan sebagainya, dalam lingkup keagamaan seperti Islam, Budha, Kristen, Konghucu, dan Katolik. Identitas dalam suatu individu dapat saja secara langsung mewakili kelompok baik itu etnitas maupun agama dan nasionalitas.⁷

Etnis, agama, dan nasionalisme adalah kekuatan besar identitas yang secara dominan mewarnai realitas dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Masyarakat cenderung menunjuk suatu individu untuk dapat mencerminkan identitas mereka secara baik, baik itu pemimpin agama, suku, ras, dan sebagainya. Kecenderungan ini menyebabkan masyarakat Indonesia menjadi suatu alat politik yang pasti untuk suatu elit politik.

⁶ Fikri and Adytyas. Politik Identitas dan penguatan Demokrasi lokal, *Tamaddun: jurnal kebudayaan dan sastra islam*, vol XVIII, 2018.

⁷ Muhtar Haboddin, 'Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal', 2003, 2012, 116-34.

Proses pelaksanaan demokrasi di Indonesia merupakan praktik pelaksanaan demokrasi yang tidak terlepas dari orientasi politik identitas etnis dan agama. Orientasi politik identitas ini dapat dilihat dalam praktik pelaksanaan demokrasi dalam Pilkada DKI Jakarta dilihat dari keikutsertaan partai-partai politik yang mengikuti pemilu atau Pilkada sebelumnya. Proses demokrasi dalam lingkup Pilkada sering melibatkan peran serta beragam partai dengan berbagai ideologi yang berbeda yang ikut menyumbang perpecahan dari ragam identitas agama dan etnis sering kali dijadikan alat politik.⁸

Politik identitas yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta tak terlepas oleh masifnya pergerakan pemberitaan media *Online* di tengah masyarakat Jakarta yang sedang melaksanakan Pilkada. Peran media berita *Online* sangat menentukan suara suatu calon karena mengingat masyarakat Jakarta mempunyai kecenderungan sebagai masyarakat yang rasional walaupun tidak merata di semua lapisan masyarakat Jakarta.

Pemberitaan yang terkesan sebagai alat yang membawa pesan dan ajakan untuk memilih calon tertentu jelas adalah politik identitas yang dilakukan media dan menjadikan *framing* terhadap calon-calon tertentu. Pada Pilkada DKI Jakarta politik identitas sangat kental dan dilakukan melewati media *meanstrem* yang mengakibatkan perpecahan dalam proses berjalanya kontestasi Pilkada pada tahun 2017 yang lalu.

2) Kajian tentang Subjektivitas, Independensi, dan *Framing* Media Massa *Online*

a) Subjektivitas media

Subjektivitas adalah penafsiran menurut perasaan manusia, melalui penilaian hanya dari satu sudut pandang. Bisa diartikan bahwa subjektivitas adalah penilaian yang berpihak dengan suatu kelompok atau pribadi tertentu. Menurut Foucault, subjektivitas sendiri adalah sistem yang dominan dari suatu organisasi yang berperan untuk menilai dari satu sudut pandang yang sangat terbatas dalam menilai sesuatu.⁹

⁸ Arya Hadi Dharmawan, 'Dinamika Sosio-Ekologi Pedesaan: Perspektif Dan Pertautan Keilmuan Ekologi Manusia, Sosiologi Lingkungan Dan Ekologi Politik', *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1.2 (2007), 1–40.

⁹ O Hasbiansyah, 'Konstelasi Paradigma Objektif Dan Subjektif Dalam Penelitian Komunikasi Dan Sosial', *Mediator*, 1 (2004), 199–218.

Subjektivitas media sendiri adalah penilaian sepihak oleh media yang menentukan atau menggiring opini masyarakat menjadi sesuai apa yang diinginkan media. Menurut Fazarinc *branding* menjadi ajang promosi dari proses pengelolaan bisnis berkaitan dengan janji dari perusahaan yang menghasilkan produk bisnis. Dalam hal ini *branding* menjadi hal yang penting di media massa, *branding* menjadi penting karena elektabilitas seseorang berpengaruh di dalamnya. Mengenai subjektivitas penilaian kelompok tertentu untuk seseorang yang di tujukan menjadi hal yang marak terjadi di media sosial terutama berita *Online*.¹⁰

Memuat sebuah berita yang bermuatan hal yang tidak objektif merupakan kesalahan dalam memberitakan sesuatu, tetapi hal yang di tampilkan oleh media *Online* sangat berbanding terbalik. Hal ini menjadikan *branding* sangat berpengaruh terhadap pandangan masyarakat terhadap seseorang yang sedang dibangun citra di dalam media masa, begitupun politik identitas dengan muatan media yang di *publish* adalah hal yang menjatuhkan seseorang dan ajakan memilih suatu calon tertentu dalam lingkup pemilihan menjadi ranah subjektivitas media massa yang menjadi bagian dari aktor politik itu sendiri.

b) **Independensi Media**

Masyarakat yang menginginkan pemberitaan yang syarat dengan kebenarandan bebas dari intervensi berbagai pihak. Kewajiban pertama jurnlisme adalah pengerjaan yang harus bermuatan kebenaran hal itu disampaikan Kovach dan Rosentiel di dalam bukunya *Sembilan Elemen Jurnalisme*. Mereka mengatakan bahwa prinsip pertama jurnalisme adalah pengajaran akan kebenaran yang tidak berat sebelah atau independen adalah hal yang paling membedakannya dari semua bentuk komunikasi lain.

Independensi media atau dapat juga disebut sebagai netralitas media dalam memuat berita, dipandang karena media merupakan alat atau sarana penyampaian informasi. Teori media yang memposisikan *media as a channels* adalah *The Null Effect Model*, yang menyatakan bahwa isi sebuah media harfus bebas dari kepentingan, intervensi, dan distorsi. Keyakinan ini berasal

¹⁰ Suharyo, 'Penelitian Bahasa Dengan Analisis Framing', *Nusa*, 13.4 (2018), 676–86.

dari asumsi tradisional bahwa “jurnalis adalah pemacar yang netral”¹¹.

Informasi yang bisa dikatakan sebagai informasi yang netral dan objektif, jika informasi itu jujur, akurat, lengkap, akurat, sesuai dengan kenyataan, dapat memisahkan antara realitas dan opini, dan data yang bisa dipertanggung jawabkan. Informasi yang diberitakan juga harus seimbang dan adil, dalam artian melaporkan kepada masyarakat perspektif-perspektif baru dalam sifat tidak sensasional dan tidak bias.

Independensi atau biasa disebut juganetralitas media dalam pemuatan berita, dalam bahasa yang lebih sistematis biasa juga disebut dengan objektifitas. Objektifitas dalam dunia jurnalistik sering kali merujuk kepada kenetralan, keadilan non partisan, dan faktualitas. Berita yang idealnya dibangun oleh suatu media, adalah sebagai perwujudan dari realitas yang ada pada peristiwa tersebut. Berita yang dimuat dan dibangun dari fenomena-fenomena dan dat-data serta analisa yang objektif tanpa ada opini yang memberatkan atau menonjolkan suatu pihak atau objektif. Realitas yang ditampilkan dalam sebuah berita haruslah murni dari hasil yang ada di lapangan.

c) **Framing Media Massa**

Ahli yang meletakkan dasar-dasar bagi analisis *framing* untuk studi isi media adalah Robert N. Entman. Mengenai konsep *framing* sendiri ditulis Entman dalam sebuah artikel dalam *Journal of Political Communication* dan di tulisan lainnya yang menerapkan konsep itu dalam studi kasus pemberitaan media. *Framing concept* oleh Entman, dipergunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan memperlihatkan aspek tertentu dari realitas oleh media masa. *Framing* dapat dilihat sebagai penempatan informasi dalam konteks khusus sehingga isu tertentu mendapatkan perhatian lebih daripada isu yang lainnya.¹²

Analisis *framing* yang dilakukan untuk pertama kali dengan cara melihat bagaimana melihat suatu media mengkonstruksi suatu realitas. Peristiwa ini yang dipahami bukan sesuatu yang *taken for granted*. Wartawan dan media dengan

¹¹ Musfialdy, ‘Independensi Media : Pro-Kontra Objektivitas Dan Netralitas Pemberitaan Media’, *JURKOM (Jurnal Riset Komunikasi)*, volume 2.Maret 2019 (2020).

¹² Rieka Mustika, ‘Analisis Framing Pemberitaan Media Online Mengenai Kasus Pedofilia Di Akun Facebook Rieka’, *Puslitbang Aptika IKP Kementerian Komunikasi Dan Informatika*, 20.2 (2017), 135–48.

sebaliknya harus melakukan hal yang secara aktif membentuk suatu realitas. Persoalan yang terdapat dalam penelitian *framing* adalah bagaimana realitas peristiwa yang ada dikonstruksi oleh media. Spesifiknya adalah bagaimana media membingkai peristiwa dalam lingkup konstruksi tertentu.¹³

Entman berpandangan bahwa *framing* berada dalam dua dimensi besar, menyeleksi isu dan penekanan aspek-aspek tertentu dari sebuah realitas atau isu kedalam sebuah berita. Penekanan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti, dan lebih diingat oleh pembaca. realitas yang akan disajikan dengan mencolok mempunyai kemungkinan lebih besar untuk lebih diperhatikan dan mempunyai dampak yang lebih besar di masyarakat dalam memahami suatu realitas. *Framing* yang dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu lainnya, dan menekankan aspek dari isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana penempatan yang mencolok penempatan headline, pengulangan, pemakaian grafis untuk memperkuat penekanan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan seseorang/peristiwa yang diberitakan.

a) Seleksi isu

Realitas yang kompleks dan beragam itu aspek yang berhubungan dengan pemilihan fakta. Realitas mana yang harus diseleksi untuk ditampilkan di media? Dari proses ini selalu terkandung di dalamnya ada bagian berita yang masukan dalam bahasa lain yaitu *included* tetapi ada juga berita yang tidak dikeluarkan atau *excluded*. Aspek atau bagian dari isu tidak semua ditampilkan, wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu untuk ditampilkan.

b) Penonjolan aspek

Penulisan fakta berhubungan dengan aspek ini. Aspek tertentu dari isu tertentu yang bersumber dari peristiwa tertentu telah dipilih sebagaimana aspek tersebut ditulis? Hal itu sangat berkaitan dengan pemakaian atau pemilihan kata, gambar, kalimat, dan cita tertentu untuk ditampilkan kepada masyarakat umum.¹⁴

¹³ Eriyanto, *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi Dan Politik Media*. (yogyakarta: PT LKiS printing cemerlang) hal 219-222.

¹⁴ Xenia Angelica and Lestari Nurhajati, 'Framing Media *Online* Atas Pemberitaan Isu Lingkungan Hidup Dalam Upaya Pencapaian Keberhasilan SDGs Indonesia', 3.1 (2019), 14–23.

Framing pada dasarnya adalah hal yang merujuk kepada pemberian definisi, evaluasi, penjelasan, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berfikir terhadap peristiwa yang diwacanakan itu terdapat dalam konsepsi Entman. Penekanan dalam berita atau biasa disebut penonjolan dalam bahasa media, tidak bisa dimaknai sebagai bias, tetapi secara ideologis sebagai strategi wacana yakni upaya menyediakan bahan pada publik tentang pandangan tertentu agar pandangan bisa lebih diterima khalayak umum. Kata penonjolan (*sailence*) didefinisikan sebagai membuat informasi lebih bermakna, berkesan, dan diperhatikan.¹⁵

Konsep *framing* dalam pandangan Entman sendiri berkembang secara konsisten menawarkan sebuah cara untuk mengemukakan *the power of communication text*. Penjelasan dengan cara yang tepat pengaruh atas kesadaran manusia yang didesak oleh komunikasi, informasi sebuah lokasi, seperti ungkapan, pidato, *news report*, atau novel disebut *framing analysis*. Menyeleksi dari beberapa aspek dari suatu pemahaman atas dasar realitas, membuatnya lebih menonjol di dalam suatu teks yang dapat dikomunikasikan sebagaimana mestinya sehingga mempromosikan sebuah definisi permasalahan yang khusus, evaluasi moral, merekomendasikan penanganannya, atau interpretasi kausal, biasa disebut dengan membuat *frame*.

Framing menurut Entman dalam berita dilakukan dengan empat cara yaitu: pertama, problem identification (mengidentifikasi masalah) peristiwa yang dilihat sebagai apa dan dengan nilai positif atau negatif. Kedua, causal interpretation (identifikasi penyebab masalah) yaitu dengan kata lain mencari tau siapa yang menyebabkan masalah. Ketiga, moral evaluation (evaluasi moral) penilaian atas penyebab masalah. Keempat, treatment recommendation (saran penanganan masalah) menawarkan suatu cara penanganan masalah dan kadang mendiskripsikan hasilnya. Pendefinisian masalah atau *define problems* adalah elemen yang untuk pertama kali hal yang bisa kita lihat mengenai *framing*. Elemen ini bagian dari bingkai /

¹⁵ Christiany Juditha, 'Hatespeech In Online Media: Jakarta On Election 2017', *Puslitbang Aplikasi Informatika Dan Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI*, 2017.

master frame yang paling utama. Penekanan yang bisa dilihat selaras dengan peristiwa yang dipahami oleh wartawan.¹⁶

Memperkirakan penyebab masalah atau *diagnose causes*, merupakan salah satu elemen *framing* untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai tokoh atau aktor dari suatu peristiwa. Penyebab dalam peristiwa ini bisa berarti apa (*what*) tetapi bisa juga (*who*).¹⁷

Membuat pilihan moral (*make moral judgment*) adalah bagian dari elemen *framing* yang dipakai untuk membenarkan/ memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat dalam peristiwa itu. terakhir yaitu *treatment recommendation* atau menekankan penyelesaian, salah satu bagian dari elemen *framing* ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan.¹⁸

Struktur berita	Unit yang diamati
Pendefinisian Masalah (<i>Define Problems</i>)	Bagaimana suatu peristiwa dapat dilihat ? sebagai apa? Atau sebagai masalah apa ?
Memperkirakan Masalah / Sumber Masalah (<i>Diagnose Cause</i>)	Peristiwa yang dilihat oleh penyebabnya, apa dianggap sebagai penyebab dari masalah? Penyebab masalah dianggap sebagai siapa atau seseorang yang menjadi aktor.
Membuat Keputusan Moral (<i>Make Moral Judgment</i>)	Apa saja yang disajikan untuk menjelaskan masalah yang berkaitan dengan nilai moral? Nilai moral apa saja yang dipakai untuk melegitimasi atau sebaliknya dalam suatu tindakan ?

¹⁶ Astinana Yulianti, M Tahir Kasnawi, and Hafied Cangara, 'Isis dan Stigma Islamofobia Framing Tentang Konstruksi Pemberitaan Isis Dalam Media Online Isis and Islamophobia Stigma : A Framing on Isis News Construction In The Online Media', 6.2 (2017), 285–93.

¹⁷ Kumala Citra Somara Sinaga, 'Analisis Framing Pemberitaan Bom Sarinah Di Kompas.Com dan Merdeka.Com' *jurnal ilmu komunikasi universitas Riau*, vol3.2 (2016), 1–12.

¹⁸ Eriyanto. *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi Dan Politik Media*. (yogyakarta: PT LKiS printing cemerlang) hal 219-222.

Struktur berita	Unit yang diamati
Menekankan Penyelesaian (<i>Treatment Recommendation</i>)	Ending atau penyelesaian apa yang ditawarkan untuk menyelesaikan suatu isu atau masalah ? jalan keluar apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi isu atau masalah ?

3) Kajian tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

a) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pilkada memiliki arti dari kepanjangan pemilihan kepala daerah, pemilihan ini digelar untuk memilih gubernur, bupati dan walikota yang dilaksanakan oleh lembaga pemilu dan dipilih secara langsung dan secara demokratis oleh rakyat di wilayah Provinsidan Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁹

Penyelenggaraan pemerintahan lokal di Indonesia telah mengalami kemajuan sejak masa reformasi, hal itu dapat dilihat dari diberlakunya UU Nomer 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah menjadi lebih terstruktur dan sistematis serta lebih desentralistis. Pilkada mempunyai landasan hukum dimana landasan hukum ini diatur dalam Undang-Undang yang sah dan dijalankan di Indonesia²⁰.

Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Peraturan Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan atas PP Nomor 66 Tahun 2005 yang berbunyi “sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”²¹.

¹⁹ Dina Lestari, ‘Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas Di Indonesia’, *Simulacra: Jurnal Sosiologi*, 2.1 (2019), 31 .

²⁰ Permadi, ‘Kontestasi Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 : Studi Tentang Jejaring Mobilitas Politik Pencalonan Ahok Djarot’, 2017, 1–16.

²¹ Sutrisno, ‘Pilkada DKI JAKARTA 2017’, *Journal Information*, volume 10.7 (2016), 1–16.

Pemilihan kepala daerah merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota. Kehidupan politik di daerah, Pilkada merupakan kegiatan yang nilainya sama dengan pemilihan DPRD. Pasal yang terkait Pilkada yaitu pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, jujur, adil.

Pembuatan UU Nomor 32 tahun 2004 ini mengalami beberapa kali perubahan pada tahun 2008 yang menjadi pasal 58 UU nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara republik Indonesia yang memenuhi syarat dimana syarat tersebut :

- a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945, cita-cita proklamasi 17 agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah
- c) Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan atas atau sederajat;
- d) Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun
- e) Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter
- f) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih
- g) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap²².

Perubahan yang signifikan ini terhadap perkembangan demokrasi di daerah, sesuai dengan tuntutan reformasi adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dan demokratis. Pemilihan yang dilakukan secara langsung dan demokratis merupakan

²² Ahmad Ilyas Hidayat, 'Kekuasaan Dalam Perspektif Islam', 2012.

konsekuensi perubahan tatanan kenegaraan kita akibat amandemen Undang-Undang Dasar 1945²³.

Menurut Winarno pelaksanaan Pilkada langsung merupakan peningkatan dan penetrasi demokrasi ditingkat lokal, dengan adanya demokrasi dalam sebuah negara, berarti dalam negara tersebut menjalankan demokrasi yang menjunjung tinggi aspirasi, kepentingan rakyatnya, dan suara rakyatnya. Sistem pemilihan yang dilakukan secara langsung merupakan salah satu alternatif yang paling masuk akal guna mendekatkan aspirasi demokrasi rakyat dengan kekuasaan pemerintah dan pada saat yang sama memberikan legitimasi politik kepada pejabat eksekutif yang dipilih dan mengemban amanat rakyatnya²⁴.

Proses demokratisasi di tingkat lokal sudah dapat diwujudkan sehingga dapat diperoleh pemimpin yang sesuai dengan pilihan yang dapat diterima dan dikehendaki oleh rakyat daerahnya sehingga pemimpin rakyat daerah tersebut dapat merealisasikan kepentingan dan kehendak rakyatnya secara bertanggung jawab sesuai potensi-potensi yang ada di daerah untuk mensejahterakan masyarakat yang memilihnya.

Pilkada secara langsung memberikan masyarakat pembelajaran politik yang dimana pembelajaran tersebut mencakup tiga aspek yaitu : meningkatkan kesadaran politik lokal, mengorganisir masyarakat kedalam suatu aktivitas politik yang memberikan peluang lebih besar pada setiap orang untuk menjabat sebagai pejabat negeri, mempreluas akses masyarakat sipil untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat daerah.²⁵

Pemilihan kepala daerah secara langsung dan demokratis merupakan suatu kebutuhan untuk mengoreksi terjadinya penyelewengan penerapan otonomi atau kekuasaan yang diberikan oleh rakyat yang ditujukan kepada elit politik lokal. Asumsi bahwa otonomi daerah akan lebih meningkatkan ekonomi daerah, meningkatkan pelayan publik, dan peningkatan-

²³ Universitas Medan, 'Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang', *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53.9 (2013), 1689–99.

²⁴ Tewolde Berhan Gebre Egziabher and Sue Edwards, 'Kajian Umum Pilkada', *Africa's Potential for the Ecological Intensification of Agriculture*, vol. 53.9 (2013), 1689–99.

²⁵ Aryojati Ardipandanto, 'Pemilihan Gubernur Dki Jakarta 2017 : Strategi Politik Kandidat The Election Of Governor Of Dki Jakarta 2017 : Candidate Politics Strategy', 1.2 (2017), 15–32.

peningkatan pelayanan masyarakat lainnya justru belum terwujud dan hanya mengumbar janji palsu saat pencalonan pilkada.

Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 menjadi momentum pembuktian pemilihan kepala daerah secara langsung di daerah yang paling menyedot perhatian masyarakat Indonesia. Dinamika politik lokal bahkan Indonesia dapat diukur dan dilihat dari pilkada di DKI Jakarta. Sejalan dengan peraturan negara yang tidak melarang pemimpin dari kalangan masyarakat apapun dan beragama apapun. Salah satu ulama muslim yang memperbolehkan hal tersebut adalah Ibnu Taimiyah, pendapatnya tentang pemimpin non muslim yang paling terkenal adalah “lebih baik pemimpin kafir yang adil, daripada dipimpin pemimpin muslim yang dzalim” kutipan Ibnu Taimiyah tersebut menjadikan perlakuan atau peluang yang sama antara calon pemimpin yang tidak memandang dari *background* agama apa yang dianut calon pemimpin tersebut.²⁶

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang pilkada DKI tahun 2017 yang membahas tentang dinamika politik dan politik identitas pernah diteliti oleh Endang Sari dalam penelitiannya yang berjudul “Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta Tahun 2017” Endang Sari membahas tentang kebangkitan politik identitas, Politik identitas dalam kontestasi pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dikupas dengan menggunakan perspektif konstruktivisme dari Pierre Van Den Bergh yang berpendapat bahwa politik identitas maupun dominasi sosial dan keagamaan dapat dengan sengaja dikonstruksikan oleh elit politik untuk mendapatkan kuasa²⁷.

Penelitian terdahulu mengenai politik identitas saat pilkada DKI Jakarta adalah penelitian oleh Ken Miichi dengan judul penelitiannya yaitu “The Role of Religion And Ethnicity in Jakarta’s 2014 Gubernatorial Election” pada tahun 2014. Ken Miichi menyimpulkan kemenangan Joko Widodo (Jokowi) pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 sebagai kemenangan demokrasi dimana pasangan dari Jokowi adalah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berasal

²⁶ Abu Tholib Khalik, ‘Pemimpin Non-Muslim Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah’, *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, 14 (2014), 59–90.

²⁷ Sari, ‘Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta Tahun 2017, *Skripsi universitas syarif hidayatullah jakarta*, 2018.

dari suku yang tidak menjadi mayoritas dan beragama berbeda dengan mayoritas penduduk Jakarta²⁸.

Menganalisa hasil Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012 yang dihubungkan dengan entitas dan agama hasil sensus nasional tahun 2000, hasilnya menunjukkan bahwa kampanye dari Fauzi Bowo sebagai petahana mampu memobilisasi pemilih Betawi. Kontestasi Pilkada DKI masa ini lebih menonjolkan symbol agama untuk menarik pemilih muslim karena total pemilih dari masrakat Betawi hanya sebesar kurang dari 30%. Politik identitas dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta memang akan selalu digulirkan, hal tersebut dapat digulirkan secara pragmatis untuk mengeksploitasi dalam sentimen keagamaan lokal.

Penelitian terdahulu, yang membahas tentang *framing* media masa terhadap pemberitaan baitul muslimin Indonesia PDI-P di harian Kompas dalam momentum kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Dengan menggunakan metode kualitatif, dimana penelitian tersebut mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana Harian Kompas dan Republika mengemas pemberitaanya. Untuk mengetahui apakah ada *framing* dalam pemberitaan Baitul Muslimin Indonesia PDI-P di Harian Kompas dan Republika. Pada penelitian ini mempunyai hasil penelitian yakni Kompas memandang kehadiran Baitul Muslimin Indonesia sebagai organisasi sayap, dapat mendukung kemenangan PDI-P dalam Pemilu maupun Pilkada. Persamaan dengan penelitian peneliti adalah subjek penelitian yang berkaitan dengan media yaitu Kompas dan Republika, tetapi terletak perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian peneliti yaitu dalam metode penelitian serta fokus penelitian yang mengangkat teori *framing* media.

Penelitian terdahulu, yang membahas tentang objektivitas media adalah penelitian yang diterbitkan oleh JURKOM atau Jurnal Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Jurnal yang membahas tentang independensi media yang mempermasalahkan objektivitas dalam pemuatan pemberitaan media yang mengambil contoh kasus pemebritaan prabowo pada saat pencalonan Pilkada DKI Jakarta yang berkaitan dengan unjuk rasa 212. Pemuatan berita yang diambil dari berbagai media *Online* adalah BBC Indonesia, dan Merdeka.com.²⁹

Penelitian yang menitik beratkan kepada netralitas media pada pemuatan beritanya. Penelitian yang membahas tentang teori netralitas dalam dunia jurnalistik dan media. Penelitian ini juga

²⁸ Ken (2014) Miichi, 'Journal of Current Southeast Asian Affairs', 2014, 55–83.

²⁹ Musfialdy., 'Independensi Media: Pro-Kontra Objektivitas Dan Netralitas Pemberitaan Media', *JURKOM (Jurnal Riset Komunikasi)*, volume 2.Maret 2019 (2020).

membahas tentang ciri bagaimana media yang tidak netral dalam pemuatan berita yang dimuat dalam kata lain adalah media yang mempunyai kepentingan untuk mendapatkan sesuatu.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan di atas, maka penelitian ini fokus pada penelitian politik identitas yang mengambil setting pada penelitian media berita *Online*. Adapun objek yang dipakai adalah Kompas.com dan Republika.co.id. penelitian ini tidak hanya menjelaskan tentang subjektivitas dalam pemuatan berita *Online* tetapi juga menunjukkan politik identitas yang dipakai pada kontestasi pemilihan kepala daerah DKI Jakarta . Lebih dari itu, penelitian ini juga akan menjelaskan *framing* dalam pemuatan berita tersebut.

Hasil dari tiga penelitian terdahulu mempunyai persamaan dengan penelitian peneliti dalam konsep politik identitasnya, objek penelitiannya, dan analisis *framing* yang dipakai. Peneliti lebih menekankan pada penelitian pemuatan berita yang berbasis *Online* oleh Kompas.com dan Republika yang mengarah kepada politik identitas.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah mengenai konsep pendekatan media yang tidak tersaji dalam penelitian terdahulu yang menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menghasilkan penelitian. Penelitian yang sedang dilakukan peneliti berbeda pula dalam cakupan politik identitasnya dimana penelitian ini mempunyai kecenderungan politik identitas dengan background satu agama yang saat itu diambil sebagai sampel dan objek penelitian.

Perbedaan selanjutnya adalah tahun penelitian dan kasus penelitian atau objek penelitian yang tidak lagi sama walaupun masih ada keterkaitan dengan Pilkada tahun 2017 di DKI Jakarta tetapi subjek penelitian yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda pula dalam ranah penelitian. Pendekatan kualitatif juga menjadi pembeda pemilihan metode penelitian dimana peneliti memilih menggunakan pendekatan metode penelitian pustaka.³⁰

Keempat kajian di atas, peneliti sudah menunjukkan perbedaan dan titik fokus penelitiannya. Oleh sebab itu peneliti perlu melanjutkan penelitian terkait politik identitas pada kontestasi pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tahun 2017 (studi atas pemberitaan media *Online* Kompas.com dan Republika.co.id)

³⁰ Amrikh Endah Palupi, 'Frame Pemberitaan Surat Kabar Harian Kompas Dan Republika Tentang Gerakan NII KW9 Edisi April 2011', *Yogyakarta: Skripsi Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2012.

C. Kerangka Berpikir

Pilkada dalam sejarah negara Indonesia awal merdeka merupakan hal yang tidak biasa dan sulit untuk menciptakan otonomi yang dapat mennetukan kemajuan dan pengelolaan daerah itu sendiri. Dengan adanya Pilkada yang menentukan pemimpin daerah sesuai apa yang diinginkan rakyat dengan kata lain bisa menentukan nasib daerahnya sendiri.

Sejarah Pilkada yang panjang menjadikan kontestasi ini terkadang dalam praktik politiknya diwarnai praktik politik yang menghalalkan segala cara, mulai dari menggunakan uang daerah untuk kampanye karena petahana, sampai menggunakan politik identitas untuk meraih kemenangan dalam kontestasi pilkada yang terjadi di sebagian daerah. Berjalannya Pilkada sampai saat ini yang diselenggarakan serentak untuk evisiensi waktu dan finansial menjadikan Pilkada menjadi lebih terstruktur.

Pilkada di DKI Jakarta menjadi salah satu Pilkada yang mendapatkan perhatian dari masyarakat Indonesia selain menjadi indikator elektabilitas sebuah partai kontestasi di DKI Jakarta menjadi indikator seberapa populer politik yang diusung oleh partai politik tersebut. Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 merupakan Pilkada yang menyerap perhatian masyarakat Indonesia karena dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta banyak praktik politik yang terjadi dan fenomena politik yang jarang terjadi di daerah lain, mengkaji tentang Politik identitas yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 apakah berdampak pula kepada Pilkada di daerah lain di Indonesia. Pergerakan media *Online* yang sangat masif di era globalisasi menjadikan dampak dari media *Online* sekarang menjadi besar pengkajian media *Online* yang merujuk dari dua nama besar yaitu Kompas.com dan Republika.co.id. Kerangka berpikir dalam penelitian ini akan dijelaskan dalam gambar di bawah ini :

Gambar 1: Kerangka berpikir



Penjelasan *mind map* diatas adalah menjelaskan bagaimana siklus politik identitas saat berlangsungnya kontestasi Pilkada DKI Jakarta berlangsung, dimana proses dalam terjadinya politik identitas sendiri media *mainstream* seperti Kompas.com dan Republika.co.id memuat dan mempublish berita yang berindikasi bermuatan politik identitas. Hal itu mengapa *mind map* dibuat agar memudahkan pemahaman dalam memahami proses pemikiran peneliti dalam meneliti permasalahan dalam penelitian ini.

Republika.co.id dan Kompas.com, sudah menjadi dua media yang mempunyai pembaca yang masif. Pada saat berlangsungnya Pilkada di DKI Jakarta menjadi momentum yang tepat dengan adanya pemberitaan yang mempengaruhi elektabilitas politik dalam kontestasi tersebut. Pemuatan berita media-media baru yang bermunculan dan memuat opininya sendiri, tidak dipungkiri banyak yang bermuatan dan berkepentingan suatu pihak.

Dengan adanya pengaruh yang besar di setiap pemuatan beritanya menjadi sangat krusial untuk pemuatan berita yang mengangkat unsur Pilkada DKI Jakarta. Hal itu dikarenakan pembaca berita yang bermuatan isu Pilkada DKI Jakarta bukan hanya dari masyarakat DKI Jakarta saja melainkan dari daerah lain di Indonesia. Hal itu menjadi proses berjalanya kontestasi Pilkada DKI Jakarta penuh dengan pemberitaan dan isu-isu politik identitas.